

Pengaruh Penyaluran ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2024

Aufa Aufiya^{1*}, Eva Ervani²

¹⁻² Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia

**Penulis Korespondensi: aufa21003@mail.unpad.ac.id*

Abstract. This study aims to analyze the effect of the distribution of Zakat, Infak, and Sadaqah (ZIS) funds, economic growth, unemployment rate, and Regional Original Revenue (PAD) on the poverty rate in West Sumatra Province during the period 2020–2024. The data used are secondary data obtained from BAZNAS, BPS, and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), covering 12 regencies/cities in West Sumatra Province. This study employs panel data regression analysis using EViews 12 software to examine the relationships among the variables. The results indicate that, partially, the distribution of ZIS funds and PAD have no significant effect on the poverty rate. In contrast, economic growth and unemployment rate have a negative and significant effect on the poverty rate. Simultaneously, all four independent variables are found to have a significant influence on the poverty rate. The coefficient of determination (Adjusted R²) is 0.123, indicating that 12.30% of the variation in the poverty rate can be explained by the variables in the study, while the remaining 87.7% is influenced by factors outside the model. The study provides policy implications suggesting that optimizing ZIS management, promoting inclusive economic growth, expanding employment opportunities to reduce unemployment, and utilizing PAD more effectively are crucial strategies for local governments and relevant institutions to effectively reduce the poverty rate in West Sumatra.

Keywords: ZIS, Economic Growth, Unemployment, Regional Original Revenue, Poverty Rate.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BAZNAS, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), mencakup 12 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews 12 untuk menganalisis hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, penyaluran dana ZIS dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, keempat variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,123, menunjukkan bahwa 12,30% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam penelitian, sementara 87,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bahwa optimalisasi pengelolaan ZIS, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan kesempatan kerja untuk menekan pengangguran, serta pemanfaatan PAD yang lebih tepat sasaran merupakan strategi penting yang perlu diterapkan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat secara efektif.

Kata kunci: ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Kemiskinan.

1. LATAR BELAKANG

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2024 diperkirakan sekitar 281,6 juta jiwa. Jumlah ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia (Badan Pusat Statistik, 2024). Data ini sejalan dengan laporan Bank Dunia yang mencatat bahwa total populasi Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 283,49 juta jiwa (World Bank, 2025). Jumlah penduduk yang

besar membuat Indonesia berada pada urutan keempat negara dengan populasi terbanyak di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. (Yasmin, 2025). Banyaknya jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memperparah berbagai persoalan sosial, termasuk permasalahan kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat hingga saat ini. Meskipun angka kemiskinan di Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, provinsi ini justru mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 5,97 persen, naik dari 5,95 persen sebelumnya. Sebaliknya, tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan dari 9,36 persen menjadi 9,03 persen. Artinya, meskipun persentase kemiskinan di Sumatera Barat relatif lebih rendah daripada rata-rata nasional, tren yang muncul tetap menunjukkan kenaikan. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan karakteristik yang beragam, sehingga tingkat kemiskinan antar daerah pun bervariasi. Pada 2024, rata-rata tingkat kemiskinan Sumatera Barat tercatat 5,97 persen, namun terdapat 9 kabupaten yang angkanya masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat di Provinsi Sumatera Barat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar 5,58 juta jiwa, di mana 98% di antaranya beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial masyarakat di daerah tersebut (Lutfi & Fitria, 2023). Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim, maka potensi zakat di daerah ini dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian, khususnya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan berbagai tujuan sosial lainnya (Adrian & Lutfi, 2023). Apabila dikelola dan didistribusikan secara optimal, zakat dipercaya dapat berperan dalam mengurangi masalah sosial, seperti kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat (Wulandari & Pratama, 2022). Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kewajiban berzakat serta meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat di Sumatera Barat.

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi atau melalui upaya redistribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dianggap berhasil apabila terjadi peningkatan pada PDB atau PDRB (khususnya PDRB atas dasar harga konstan) yang dampaknya dapat dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat (Tumaleno et al., 2022). Pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar -1,61% akibat dampak pandemi

COVID-19. Namun, mulai 2021 hingga 2023 pertumbuhan terus meningkat, dengan angka tertinggi pada 2023 sebesar 4,62%. Kemudian pada tahun 2024, pertumbuhan sedikit menurun menjadi 4,36%. Meskipun begitu, dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat belum sepenuhnya optimal. Sektor-sektor utama penggerak ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan pertanian tumbuh positif, namun sektor informasi dan komunikasi yang memiliki potensi besar belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin karena pemanfaatannya belum diarahkan pada aktivitas ekonomi produktif.

Salah satu penyebab yang turut mendorong meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia adalah minimnya pendapatan akibat pengangguran maupun setengah pengangguran. Pengangguran memiliki hubungan positif dan berdampak kuat pada tingkat kemiskinan. Pengangguran dapat terjadi akibat tingginya laju pertambahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, serta rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan penciptaan lapangan kerja belum mampu mengakomodasi jumlah tenaga kerja yang siap bekerja (Imanto et al., 2020). Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat mengalami tren penurunan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka berada di angka tertinggi, yaitu 6,88%. Akan tetapi, persentase tersebut terus menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai 5,75% pada 2024.

Kemampuan fiskal daerah memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Salah satu indikator utamanya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk program pembangunan serta pelayanan publik, termasuk upaya pengentasan kemiskinan. Tingginya PAD memberi ruang fiskal lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur, sehingga berpotensi menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) akan memperbesar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan serta menyediakan pelayanan publik (Parulian et al., 2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020–2024 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan PAD mencerminkan bertambahnya kapasitas fiskal daerah yang berpotensi memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu diteliti kembali bagaimana Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat Periode 2020-2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun nonpangan, yang diukur melalui tingkat pengeluaran. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi standar kehidupan rata-rata yang berlaku di suatu wilayah. Keadaan ini tercermin dari rendahnya pendapatan individu yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pendapatan yang terbatas tersebut juga berdampak pada terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang sesuai dengan standar kehidupan masyarakat pada umumnya (Ilham & Octaviani, 2024).

Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Secara bahasa, kata "zakat" berasal dari istilah "zakaa" yang mengandung makna kesucian, pertumbuhan, keberkahan, dan kebaikan. Sedangkan dalam pengertian istilah, zakat merupakan sejumlah harta dengan kadar tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam (Pida & Zein, 2025). Secara etimologis, infak berasal dari kata "anfaqa" yang bermakna membelanjakan atau mengeluarkan harta. Dalam konteks syariat, infak dipahami sebagai perbuatan memberikan sebagian harta atau pendapatan untuk tujuan yang dianjurkan dalam Islam, seperti memberikan bantuan kepada anak yatim, fakir miskin, mendukung operasional masjid, atau membantu korban bencana (Mustakim et al., 2022). Sedekah berasal dari kata "shadaqah" dalam bahasa Arab yang artinya kebenaran. Sedekah adalah pemberian, baik dalam bentuk harta maupun non-harta, yang dikeluarkan oleh individu maupun lembaga di luar kewajiban zakat, dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama (Afifah et al., 2022).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pengembangan kemampuan suatu negara, terutama di bidang ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa. Proses ini mencerminkan pembaharuan ekonomi secara berkelanjutan dengan tujuan mencapai kondisi yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu (Raysharie et al., 2025). Berbagai aspek pertumbuhan ekonomi dapat terlihat dari meningkatnya produksi barang industri, bertambahnya lembaga pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana, berkembangnya sektor jasa, serta bertambahnya produksi barang-barang penunjang kegiatan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diartikan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh

seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh unit-unit ekonomi di wilayah tersebut.

Pengangguran

Pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja memiliki keinginan untuk bekerja, tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan, namun sedang aktif mencari kerja atau tengah mempersiapkan diri untuk memulai usaha baru (Aswanto & Edward, 2025)

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan (Nusa, 2024). (Nusa, 2024). Dalam konteks desentralisasi, PAD menjadi instrumen penting yang memberikan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi sesuai kapasitas wilayah, serta memperkuat kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah (Ramadhani et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel serta memanfaatkan data sekunder. Data yang digunakan berupa data tahunan dalam bentuk data panel, yaitu gabungan antara data time series dan cross section periode 2020 hingga 2024. Variabel yang dianalisis meliputi penyaluran ZIS, produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, pendapatan asli daerah (PAD), serta tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Sumber data diperoleh dari BAZNAS Sumatera Barat, BPS Sumatera Barat, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data, Rentang Waktu, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BAZNAS Sumatera Barat, BPS Sumatera Barat, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Objek penelitian dalam studi ini adalah beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang datanya tersedia lengkap pada periode 2020–2024. Total sampel akhir yang dianalisis terdiri dari 12 kabupaten/kota, setelah dilakukan

penyaringan berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam penelitian dan dilakukan identifikasi outlier menggunakan metode boxplot. Dengan periode pengamatan selama 5 tahun, maka jumlah keseluruhan observasi data panel adalah 60 observasi.

Hasil Analisis Data

Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Hasil statistik deskriptif memperlihatkan sebaran variabel sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel.

Variabel	Mean	Min	Max	Standar Deviasi
Penyaluran ZIS (Miliar Rupiah)	6.19	2.24	11.61	2.53
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (%)	2.98	-1.44	4.84	2.17
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.32	3.57	8.35	0.91
Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)	94.77	32.96	164.72	36.66
Tingkat Kemiskinan (%)	5.59	2.16	8.01	1.73

Sumber: Diolah dari Output Eviews 12

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata penyaluran ZIS di 12 kabupaten/kota Sumatera Barat periode 2020–2024 sebesar Rp6,19 miliar dengan variasi cukup besar antar daerah. Pertumbuhan ekonomi rata-rata tercatat 2,98 persen dengan kontraksi terdalam -1,44 persen di masa pandemi dan pemulihan hingga 4,84 persen pasca pandemi. Tingkat pengangguran terbuka relatif homogen dengan rata-rata 5,32 persen, sedangkan PAD rata-rata Rp94,77 miliar menunjukkan kesenjangan fiskal antar daerah. Adapun tingkat kemiskinan rata-rata sebesar 5,59 persen dengan perbedaan tidak terlalu besar antar daerah, meskipun masih terdapat wilayah dengan tingkat kemiskinan yang lebih besar dibandingkan daerah lain.

Hasil Uji Chow

Uji Chow merupakan uji yang dilakukan untuk memilih Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Berikut merupakan hasil dari uji Chow:

Tabel 2. Hasil Uji Chow.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	115.434097	(11,44)	0.0000
Cross-section Chi-square	203.788222	11	0.0000

Sumber: Diolah dari Output Eviews 12

Berdasarkan output Eviews pada tabel 2, didapatkan nilai probabilitas Chi-square adalah 0,0000. Nilai tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 5% (0,05), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu, model yang sesuai untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Hasil Uji Hausman

Tahap berikutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk menentukan model yang lebih sesuai digunakan, apakah Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Adapun hasil Uji Hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hausman.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.456692	4	0.2436

Sumber: Diolah dari Output Eviews 12

Mengacu pada output Eviews pada tabel 3, diperoleh nilai probability cross section random sebesar 0,2436. Karena nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi 5% (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, model yang sesuai untuk digunakan adalah *Random Effect Model*.

Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tahap selanjutnya adalah melakukan Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan model yang lebih tepat digunakan, yaitu antara Random Effect Model dan Common Effect Model. Hasil uji Lagrange Multiplier (LM) ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM).

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	98.41181 (0.0000)	0.833327 (0.3613)	99.24513 (0.0000)

Sumber: Diolah dari Output Eviews 12

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch-Pagan pada Tabel 4, diperoleh nilai probability sebesar 0,0000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM). Temuan ini konsisten dengan hasil uji Hausman yang sebelumnya juga mengindikasikan bahwa REM lebih sesuai digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Regresi Data Panel

Tabel 5. Hasil Uji T.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.594835	0.646119	10.20685	0.0000
X1_ZIS	0.019279	0.033771	0.570881	0.5704
X2_PDRB	-0.056269	0.025434	-2.212381	0.0311
X3_TPT	-0.155302	0.054897	-2.828984	0.0065
X4_PAD	-0.001428	0.003928	-0.363679	0.7175

Sumber: Diolah dari Output Eviews 12

Berdasarkan estimasi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), penelitian ini memperoleh persamaan model tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

$$TK_{it} = 6.594835 + 0.019279ZIS_{it} - 0.056269PDRB_{it} - 0.155302TPT_{it} \\ - 0.001428PAD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dari persamaan di atas, diketahui bahwa nilai konstanta 6,594835 menunjukkan bahwa jika Penyaluran ZIS (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), Tingkat Pengangguran Terbuka (X3), dan Pendapatan Asli Daerah (X4) sama dengan nol, tingkat kemiskinan diperkirakan 6,59%. Koefisien X1 (0,019279) berarti setiap kenaikan penyaluran ZIS 1 miliar rupiah meningkatkan kemiskinan 0,0193%. Koefisien X2 (-0,056269) menunjukkan pertumbuhan ekonomi 1% menurunkan kemiskinan 0,0563%. Koefisien X3 (-0,155302) berarti kenaikan TPT 1% menurunkan kemiskinan 0,1553%, dan koefisien X4 (-0,001428) menunjukkan PAD 1 miliar rupiah menurunkan kemiskinan 0,0014%.

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 6, nilai F-hitung sebesar 3,069145, sedangkan F-tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan $df_1 = 4$ dan $df_2 = 55$ sebesar 2,540. Karena $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($3,069145 > 2,540$) dan nilai probabilitas $0,023615 < 0,05$, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penyaluran ZIS, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 12 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 6. Hasil Uji F.

F-statistic	3.069145
Prob(F-statistic)	0.023615

Sumber: Diolah dari Output Eviews 12

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 6, nilai F-hitung sebesar 3,069145, sedangkan F-tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan $df_1 = 4$ dan $df_2 = 55$ sebesar 2,540. Karena $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($3,069145 > 2,540$) dan nilai probabilitas $0,023615 < 0,05$, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penyaluran ZIS, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 12 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

R-squared	0.182479
Adjusted R-squared	0.123023

Sumber: Diolah dari Output Eviews 12

Berdasarkan hasil pada tabel 7, nilai Adjusted R-Square sebesar 0,123023, yang menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Penyaluran ZIS, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendapatan Asli Daerah, secara simultan

menjelaskan 12,30% variasi tingkat kemiskinan, sementara 87,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Penyaluran ZIS terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan interpretasi hasil regresi data panel, dapat diketahui bahwa penyaluran ZIS tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 12 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari & Pratama (2022) yang menyatakan bahwa variabel ZIS tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran ZIS belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan karena dana yang terkumpul masih relatif kecil dibanding kebutuhan masyarakat. Selain itu, distribusi oleh lembaga zakat belum optimal dalam hal ketepatan dan kecepatan, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat serta minimnya sosialisasi tentang kewajiban zakat (Wulandari & Pratama, 2022). Sebagian besar muzakki atau individu cenderung menyalurkan zakat, infak, dan sedekah langsung kepada penerima manfaat (mustahik), tanpa melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ. Akibatnya, data ZIS yang tercatat oleh lembaga resmi tidak sepenuhnya merepresentasikan jumlah distribusi ZIS yang sebenarnya, sehingga pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan tidak terlihat signifikan dalam penelitian ini.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Analisis regresi data panel memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan di 12 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2020–2024. Hasil ini sejalan dengan penelitian Adrian & Lutfi (2023), yang menemukan hubungan negatif signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa PDRB dapat dijadikan indikator utama kesejahteraan, di mana kenaikan PDRB mengindikasikan meningkatnya aktivitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan, serta membaiknya daya beli masyarakat. Kondisi ini juga memperluas basis pajak, sehingga pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai program-program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan dapat berkurang.

Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkar Kemiskinan

Berdasarkan interpretasi hasil regresi data panel, dapat diketahui bahwa Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 12 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024. Penelitian oleh Adrian & Lutfi (2023) juga menemukan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena meskipun ada anggota keluarga yang menganggur, anggota lain masih bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, keberadaan penganggur dalam rumah tangga tidak serta-merta menjadikan keluarga tersebut miskin, karena pendapatan anggota lain masih mampu menjaga kondisi ekonomi rumah tangga di atas garis kemiskinan. Selain itu, adanya program perlindungan sosial dari pemerintah mampu menjaga daya beli kelompok penganggur, sehingga dampak pengangguran terhadap kemiskinan menjadi tidak searah. Fenomena meningkatnya pengangguran namun tidak diikuti kenaikan kemiskinan sering terjadi di perkotaan. Umumnya disebabkan oleh lulusan baru yang membutuhkan waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan, atau individu yang sengaja menunda bekerja demi mencari pekerjaan yang lebih baik. Meskipun terdapat pengangguran, anggota keluarga lainnya yang memiliki penghasilan cukup biasanya tetap menopang kehidupan keluarga, sehingga rata-rata pendapatan rumah tangga tetap di atas garis kemiskinan (Adrian & Lutfi, 2023).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat selama periode 2020–2024. Hasil ini konsisten dengan temuan Lindrianti (2022) yang juga menyatakan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara konseptual, peningkatan pendapatan daerah seharusnya menekan angka kemiskinan. Namun, dalam studi ini PAD tidak menunjukkan peran tersebut, kemungkinan karena pengelolaannya belum optimal atau alokasinya kurang tepat sasaran, sehingga belum memberi dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan (Lindrianti, 2022). Di banyak daerah, terutama di Sumatera Barat, PAD porsinya lebih kecil dibanding Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Transfer dari APBN. Jadi kontribusi PAD terhadap penurunan kemiskinan lebih lemah dibanding sumber dana lainnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, dana transfer menyumbang 80,06% dari total pendapatan daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi sebesar 19,94% pada tahun 2024.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menganalisis hubungan antara penyaluran ZIS, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tingkat kemiskinan pada 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat periode 2020–2024. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ZIS dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memberikan pengaruh yang signifikan. Uji simultan juga menunjukkan bahwa keempat variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan dengan adjusted R^2 sebesar 0,123. Hal ini menandakan bahwa model hanya mampu menjelaskan 12,3% variasi kemiskinan, sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperkuat sektor-sektor produktif seperti pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja luas serta memperluas akses pendidikan dan pelatihan keterampilan guna menekan pengangguran. Optimalisasi pemanfaatan PAD juga perlu diarahkan pada program-program yang berpihak kepada masyarakat miskin, termasuk peningkatan layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Di sisi lain, pengelolaan ZIS perlu ditingkatkan melalui strategi distribusi yang lebih produktif, transparansi, serta kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah agar dampaknya terhadap kemiskinan lebih nyata. Untuk penelitian berikutnya, disarankan menambahkan variabel tambahan, memperpanjang periode penelitian, dan memperluas cakupannya agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.

DAFTAR REFERENSI

- Adrian, A., & Lutfi, M. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi dana zakat infak sedekah (ZIS), tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2020. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 159–168. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.540>
- Afifah, A. A. N., Soleman, R., & Mulyadi, S. (2022). Penafsiran ayat dan hadits sedekah dalam perspektif Islam. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Aswanto, A., & Edward, Y. (2025). Analisis tingkat pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Analisis*, 15(1), 98–116. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5327>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024 (Statistical Yearbook No. 03200.24003)*. Badan Pusat Statistik.
- <https://bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>

- Ilham, A. N., & Octaviani, D. (2024). Analisis peran faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 771–780. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.16560>
- Imanto, R., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. *Al-Infqaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2).
- Lindrianti, N. F. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan alokasi dana dari pusat terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2015–2020. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(1), 46–56. <https://doi.org/10.14710/djoe.32822>
- Lutfi, M., & Fitria, M. N. (2023). Analisis pengaruh zakat, infaq, shadaqah (ZIS), indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017–2020. *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 70–83. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.456>
- Mustakim, Arina, Sepitriani, I., Hidayatudin, Khalik, F., & Misryanti. (2022). Zakat, infak, dan shadaqah sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasulullah S.A.W (studi kasus di Desa Parit Pudin) dalam pendekatan pembelajaran survey dan pengabdian masyarakat. *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1).
- Nusa, Y. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah dalam mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan fixed effect model (studi kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Papua). *Journal of Financial and Tax*, 4(1), 60–79.
- Parulian, R. J., Deliana, D., & Hidayah Napitupulu, I. (2024). Analisis penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) ditinjau dari kontribusi PAD, elastisitas PAD dan kinerja pajak daerah pada Pemerintah Kota Sibolga. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(4), 744–760. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i4>
- Pida, D. F., & Zein, A. W. (2025). Peran zakat dalam membangun ekonomi berkelanjutan: Tinjauan aksiologi filsafat ekonomi Islam. *Polyscopia*, 2(1), 52–59. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1590>
- Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). Analisis pengaruh belanja daerah dan PDRB terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 20–37. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511>
- Raysharie, A. A. P. I., Donella Cleodora T. H., Lusiana Simandalahi, Maret Novia Putri, & Yetno. (2025). Peran dan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2023. *Journal of Economics and Regional Science*, 5(1).
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2020). *Introduction to econometrics* (4th ed., p. 801). Pearson Education Limited.
- Tumaleno, A. F., Riazis, K. R., & Rosnawintang. (2022). Pengaruh jumlah penduduk terhadap produk domestik regional bruto di Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 189–195. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.135>
- World Bank. (2025). Population, total—Indonesia [Data set]. World Bank Data. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID>

Wulandari, I., & Pratama, A. A. N. (2022). Analisis pengaruh dana ZIS (zakat, infak, sedekah), pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2010–2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3301. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6501>

Yasmin, N. M. (2025). The problems of the population in Indonesia. *IRDH International Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(1).